

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Indonesia merupakan Negara maritim agraris yang sebagian besar wilayahnya areal pertanian dan penduduknya bekerja pada sektor pertanian, sebagai gambaran dari eksistensi wilayah Indonesia merupakan wilayah agraris nampak pada beberapa wilayah di Indonesia, termasuk wilayah Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini bisa kita lihat di Pulau Lombok yang sebagian besar wilayah merupakan areal pertanian. Keberadaan areal pertanian di Pulau Lombok terbagi dalam dua kategori kondisi perairan, sebagian wilayah pertanian yang berada di tengah dengan kondisi dataran rendah yang subur berupa daerah persawahan dengan ketersediaan air yang cukup sepanjang tahun, dan sebagian wilayah di daerah selatan merupakan bagian yang agak berbukit dan kering merupakan areal sawah tadah hujan.

Wilayah selatan yang dimaksud terdiri dari sebagian wilayah Kabupaten Lombok Tengah dan Kabupaten Lombok Timur. Khusus di Lombok Timur terdiri dari lima Kecamatan yaitu Kecamatan Sakra, Kecamatan Sakra Timur, Kecamatan Sakra Barat, Kecamatan Keruak, dan Kecamatan Jerowaru. Wilayah tersebut dalam pemanfaatan lahannya masih kurang maksimal dikarenakan kekurangan air yang menjadi sumber pokok dalam menjalankan kegiatan sektor pertanian. Kekurangan air ini berdampak pada pola tanam masyarakat hanya menjadi pola tanam musiman, yaitu pada musim hujan, kondisi ini sangat dirasakan oleh masyarakat petani yang berada di wilayah Lombok Timur bagian selatan seperti yang disebutkan di atas, yang merupakan daerah dengan kondisi persediaan air irigasi tergolong sangat memperhatikan, karenanya sangat diharapkan usaha-usaha penanggulangan kebutuhan pengairan pada musim kemarau (atau dalam bahasa Sasak Lombok Musim *Kembali*) seperti pembangunan Waduk, Embung, dan Bendungan yang akan memberikan dampak positif bagi masyarakat Petani.

Sebagai gambaran kondisi perairan khususnya pada sektor pertanian di Kabupaten Lombok Timur bagian selatan beberapa tahun silam menunjukkan beberapa kali mengalami gagal panen bahkan gagal tanam, Pada tahun 1996 dan 1997 sebagian dari wilayah Lombok Timur bagian selatan mengalami kekeringan dan tidak bisa bercocok tanam (yang biasanya hal tersebut rentan pada musim kemarau atau *kembali*). Selain dalam kurun waktu dua tahun berturut-turut tersebut aktifitas bercocok tanam sering mengalami keterlambatan, sehingga berdampak terjadi gagal panen pada beberapa masa tanam di tahun tertentu beberapa waktu yang lalu. Adapun masa tanam hanya dua kali dalam satu tahun, yaitu pada musim hujan (*Kentaun*) rata-rata menanam padi, dan pada musim kemarau (*Kembali*) rata-rata menanam tembakau, dan yang paling sering mengalami kekurangan air pada musim *Kembali*.

Melihat kondisi seperti yang penulis paparkan di atas Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur beserta Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan didukung oleh pemerintah pusat melanjutkan perencanaan pembangunan Bendungan Pandandure yang bertahun-tahun terbengkalai pengerjaannya, yang sebenarnya perencanaan ini sudah dimulai sejak Tahun 1996 atau masa orde baru. Seiring kondisi konstelasi politik nasional pada saat itu membuat perjalanan pembangunan terbengkalai, baru setelah Pada tahun 2011 pengerjaan pembangunan bendungan dilanjutkan lagi dan Pada tahun 2014 pengerjaannya sudah rampung dan telah diresmikan oleh Menteri Pekerjaan Umum Pada tanggal 14 Oktober 2014. Bendungan ini menelan biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), *sharing* dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lombok Timur senilai 728 Miliar dengan luas 442 hektar, yang selanjutnya fungsinya untuk pengairan pertanian di wilayah Lombok Timur bagian selatan yang mencakup lima Kecamatan. Adapun pembangunan bendungan ini terletak di wilayah Desa Suangi Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur.

Pintu air yang ada di bendungan Pandandure ini aksesnya hanya bisa menghubungkan ke wilayah Kecamatan Sakra Barat, Kecamatan Keruak, Kecamatan Jerowaru, dan termasuk yang menghubungkan ke sebagian wilayah Lombok Tengah. Sementara pintu air yang diharapkan bisa terhubung ke wilayah Kecamatan Sakra dan Kecamatan Sakra Timur sampai saat ini tidak ada sama sekali, selain itu setidaknya wilayah tempat dibangunnya bendungan tersebut selain aspek manfaat juga penting memberdayakan masyarakat setempat sebagai imbal balik (*feed back*) dari eksploitasi lahan mereka. Sehingga dengan pembangunan tersebut masyarakat di sekitarnya baik secara langsung maupun tidak langsung merasakan kemanfaatan yang signifikan baik pada sektor pertanian maupun sektor perekonomian yang lain.

Keberadaan bendungan ini tidak berdampak sama sekali bagi masyarakat petani Kecamatan Sakra sehingga menimbulkan beberapa masalah seperti sering terjadi percekcoakan antara masyarakat dengan petugas pengairan seperti *Pekasih* (petugas pengairan) yang ada di tingkat desa, yang sebenarnya persoalan pembangunan bendungan ini bukan wewenang petugas pengairan atau *Pekasih*, dan masalah ini merembet pada persoalan pembayaran pesangon tahunan kepada petugas pengairan, yang beberapa waktu terakhir ini banyak masyarakat tidak mau mengeluarkan atau membayar pesangon kepada petugas pengairan, sehingga ketika pembagian air irigasi pada masa tanam, masyarakat yang tidak membayar pesangon tersebut dikesampingkan bahkan tidak mendapatkan air untuk bercocok tanam.

Selain itu sering terdengar sumpah serapah masyarakat terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur, karena merasa kesal tidak mendapatkan manfaat dari Pembangunan Bendungan tersebut, bukan hanya itu malah pernah masyarakat melakukan aksi demo kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur dan beberapa instansi terkait. Adapun tindakan yang dilakukan oleh beberapa tokoh masyarakat sebagai upaya meminta kejelasan dari pihak Pemerintah Daerah Kabupaten melalui Pemerintah Kecamatan, selain itu juga upaya yang dilakukan ialah

berkoordinasi dengan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Timur untuk disampaikan ke pihak pemerintah daerah. Akan tetapi hingga saat ini belum ada kejelasan dari pihak-pihak terkait untuk memberikan solusi atas masalah-masalah yang timbul di tengah-tengah masyarakat.

Mengingat masalah-masalah yang terjadi masih tergolong baru yaitu sejak bendungan ini beroperasi kurang lebih satu setengah tahun yang lalu, maka fenomena konflik yang terjadi tersebut masih bersifat sederhana seperti terjadinya demo massa, penutupan pintu air secara langsung maupun simbolis, serta luapan kata-kata kekesalan terhadap pihak pemerintah di tataran Kabupaten. Namun memang ada beberapa konflik yang sudah tergolong cukup mencuat ke-permukaan, dalam hal ini terlihat konflik antara masyarakat dengan petugas pengairan di tingkat bawah seperti yang dijelaskan di atas, dan pada sisi lain tidak menutup kemungkinan akan terjadi konflik baru yang lebih besar. Mengingat perkembangan isu-isu hangat yang beredar di tengah masyarakat akan segera mengambil tindakan yang menurut sebagian besar masyarakat Kecamatan Sakra sudah saatnya mereka mengambil tindakan apapun resiko yang akan terjadi, karena memang persoalan tersebut merupakan kebutuhan yang sangat mendasar dan hal itu juga dianggapnya sebagai persoalan hidup dan mati nasib masa depan mereka.

Sebagaimana kita ketahui bahwa pembangunan sangat besar manfaatnya bagi segenap masyarakat karena pembangunan tersebut merupakan usaha-usaha untuk memenuhi kebutuhan hajat dan hidup masyarakat di suatu daerah maupun di suatu bangsa dan manusia secara umum, namun tidak jarang juga terdapat dampak negatif dari sebuah pembangunan, bukan kesejahteraan yang didapatkan dan dirasakan tetapi malah menjadi korban dari apa yang seharusnya mereka dapatkan, serta memungkinkan timbulnya rasa sentimen dan bahkan menimbulkan konflik sosial baik secara vertikal maupun horizontal, seperti halnya masalah pembangunan Bendungan Pandandure ini.

Dari gambaran permasalahan yang dijelaskan di atas, maka hal ini menarik minat penulis untuk mengangkat serta ingin meneliti lebih jauh tentang dampak pembangunan Bendungan Pandandure Terhadap Konflik di Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur, untuk melihat konflik atas Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur dalam Pembangunan Bendungan Pandandure, di satu sisi memang memberikan kesejahteraan namun di sisi yang lain justru menimbulkan konflik. Sumber penyebabnya ialah masih tumpang tindihnya kebijakan dari Pembangunan Bendungan tersebut, khususnya pada masyarakat yang berada di Kecamatan Sakra yang menjadi korban kesenjangan kebijakan pembangunan Bendungan Pandandure.

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian pembahasan dalam latar belakang di atas, maka dapat dikemukakan pertanyaan penelitian yang dijadikan persoalan dasar dalam penelitian ini mengenai dampak pembangunan Bendungan Pandandure terhadap konflik antara masyarakat petani dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur diakibatkan kebijakan Pembangunan Bendungan Pandandure.

Untuk mempertajam uraian di atas maka peneliti mensistematisasikan dan mempertajam pemahaman dalam menjelaskan persoalan pokok tersebut dengan mengemukakan pertanyaan teknis sebagai berikut :

- 1.2.1 Bagaimana gambaran konflik vertikal antara masyarakat Petani dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur?
- 1.2.2 Bagaimana bentuk konflik vertikal antara masyarakat Petani dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur?
- 1.2.3 Bagaimana dampak konflik terhadap andil masyarakat dalam memenuhi tanggung jawab sosial pembangunan Daerah Kabupaten Lombok Timur?
- 1.2.4 Bagaimana upaya yang dilakukan pemerintah daerah dan masyarakat dalam mengatasi konflik tersebut?

1.3 Tujuan Penelitian

Suryadi, 2016

DAMPAK PEMBANGUNAN BENDUNGAN PANDANDURE TERHADAP KONFLIK DI KECAMATAN SAKRA KABUPATEN LOMBOK TIMUR

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Adapun tujuan melakukan penelitian ini ialah :

- 1.3.1 Untuk mengetahui gambaran konflik vertikal antara masyarakat dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur.
- 1.3.2 Untuk mengetahui bentuk konflik vertikal antara masyarakat petani dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur.
- 1.3.3 Untuk mengetahui dampak konflik terhadap andil masyarakat dalam memenuhi tanggung jawab sosial Pembangunan Daerah Kabupaten Lombok Timur.
- 1.3.4 Untuk mengetahui upaya yang dilakukan pemerintah daerah dan masyarakat dalam mengatasi konflik tersebut.

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara teoritis maupun praktis

1.4.1 Manfaat Secara Teoritis

Dengan penelitian ini diharapkan bisa menjadi acuan bagi mahasiswa yang ingin mengkaji tentang masalah yang berkaitan dengan masalah-masalah sosial, serta dapat mengkajian masalah yang ada dalam penelitian ini dan dikomparasikan atau dipadankan dengan teori-teori konflik yang ada untuk diimplementasikan dalam pembelajaran sosiologi. Hasil penelitian ini pun betul-betul dapat memperkaya pengetahuan tentang konflik yang terjadi dalam masyarakat Indonesia, serta wawasan dan keilmuan dalam sosiologi konflik

1.4.2 Manfaat Praktis

Adapun manfaat-manfaat praktis yang diharapkan dengan penelitian ini ialah :

- 1.4.2.1 Bagi peneliti, diharapkan mendapatkan manfaat khazanah keilmuan baru dari masalah yang ada baik secara langsung maupun tidak langsung dalam melihat gejala sosial di tengah-tengah masyarakat.
- 1.4.2.2 Bagi masyarakat, dengan diadakannya penelitian ini diharapkan bisa membuka akses serta dijadikan bahan pertimbangan bagi Pemerintah Daerah untuk memberikan hak-hak secara merata

untuk masyarakat sehingga mendapatkan manfaat dari Pembangunan Bendungan tersebut.

1.4.2.3 Bagi pemerintah, diharapkan dapat dijadikan pedoman dalam menentukan kebijakan agar tercipta keadilan dan kesejahteraan secara merata dan menyeluruh dalam kehidupan masyarakat secara umum.

1.5 Struktur Organisasi Tesis

Dalam penelitian yang penulis lakukan ini, dan untuk mempermudah dalam memahaminya, maka dibutuhkan sebuah sistematika penulisan, sehingga terorganisir dalam satu wadah yang lebih sederhana. Adapun sistematikanya sebagai berikut;

Bab *pertama*, latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan struktur organisasi tesis. Pada bab *kedua*, memuat landasan teori kekuasaan dan teori konflik, serta beberapa sub persoalan terkait kedua teori tersebut, termasuk di dalamnya tentang resolusi konflik. Bab *ketiga*, memuat metode penelitian yang di dalamnya terdapat pendekatan penelitian, desain penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Pada bab *keempat*, disuguhkan temuan, hasil penelitian, dan pembahasan yang meliputi gambaran umum tempat penelitian, deskripsi hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian terkait gambaran konflik, bentuk konflik, dampak konflik, dan upaya mengatasi atau resolusi konflik yang terjadi antara masyarakat petani Kecamatan Sakra dengan pemerintah Kabupaten Lombok Timur. Pada bab *kelima*, dimuat simpulan, implikasi, dan rekomendasi.